

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, Artikel

- Direktur Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017, Desember). *Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola agar Bermanfaat bagi Bangsa*. Jakarta.
- Fuady, M. (2013). *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. West Group.
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press, 16-17.
- Hartini, R. (2017). *BUMN Persero, Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Harun, R. (2019). *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol dan Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, R. (2007). *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*. *Jurnal Hukum Bisnis Vol.26, No.1*, 32-33.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyono. (2008). *Skripsi: Hubungan Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas pada Laporan Keuangan Interim dan tahunan terhadap Abnormal Return Saham*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Noor, H. J. (2018). *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Prasetio. (2013). *Penerapan Business Judgement Rule dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta Timur: PT RAYYANA Komunikasindo.
- Rajagukguk, E. (2006). *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*. Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia.

Salim, & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Warsito, H. (2007). *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, R. A. (2017). When anti corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experience. *Springer Science+Business Media BV., part of Springer Nature 2017*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan

Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan

Tol di Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan

Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta,

Bogor, Depok, dan Bekasi

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas bagi Pengadilan

C. Internet

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200913/45/1290893/hutama-karya-berharap-dana-talangan-tanah-rp19-triliun-dibayar> diakses pada 23 September 2020

<https://kppip.go.id/tentang-kppip/> diakses pada tanggal 16 September 2020,

<https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> diakses tanggal 16 September 2020

<https://properti.kompas.com/read/2020/09/08/120000921/catat-lrt-jabodebek-beroperasi-komersial-juli-2022> diakses pada 28 September 2020

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190325092456-92-380332/indef-sebut-infrastruktur-jokowi-ganggu-keuangan-bumn-karya> diakses pada 16 September 2020

<https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/> diakses pada 20 Juli 2020

<https://jakarta.bisnis.com/read/20190131/77/884520/pemprov-dki-sepakat-lokasi-stasiun-lrt-jabodebek-di-dukuh-atas> diakses pada 27 September 2020

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3903104/target-pengoperasian-mundur->

[biaya-investasi-lrt-jabodebek-membengkak](#) diakses pada 28 September
2020

<https://www.pefindo.com/pagement/page/rating-services.html> diakses pada 27
September 2020

<https://www.pu.go.id/berita/view/17030/daya-saing-indonesia-naik-11-peringkat->
[ketersediaan-infrastruktur-turut-berkontribusi](#) diakses pada 20 Juli 2020

D. Lain-lain

Laporan Tahunan 2019 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Laporan Tahunan 2019 PT Hutama Karya (Persero)

Laporan Tahunan 2019 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Laporan Tahunan 2019 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Laporan Tahunan 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Laporan Tahunan 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Siaran Pers Pefindo untuk Corporate Rating PT Adhi Karya (Persero)
Tbk tanggal 18 Agustus 2020.

Siaran Pers Pefindo untuk Corporate PT Hutama Karya (Persero)
tanggal 9 September 2020.

Siaran Pers Pefindo untuk Corporate Rating PT Jasa Marga (Persero)
Tbk tanggal 19 Agustus 2020.

Siaran Pers Pefindo untuk Corporate Rating PT Kereta Api Indonesia
(Persero) tanggal 14 September 2020.

Siaran Pers Pefindo untuk Corporate Rating PT Waskita Karya
(Persero) Tbk tanggal 19 Agustus 2020.